



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**



TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2022, sebagai konsekuensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju Reformasi Birokrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yaitu : “ ***Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa*** ”, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022 dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Buntok, Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*). Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2022 berikut dengan target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, disusun berdasarkan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2022.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :





Tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Barito Selatan periode 2017-2022, Sehingga RKPD Tahun 2022 difokuskan pada tema **“Pemantapan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barito Selatan bermartabat”**.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagaimana yang telah diamanatkan dan berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).**
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 yang merupakan kondisi awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 sehingga dalam pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja masih memerlukan perencanaan yang matang.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintahah Yang Baik (Good Governance).

Buntok, 20 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA





DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	2
1. Aspek Politik	2
2. Aspek Manajemen Pemerintah	3
3. Kewenangan	3
4. Tugas Pokok	3
5. Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	8
B. Visi Dan Misi	10
C. Program Utama Prioritas	16
Pembangunan Daerah	
1. Pemerataan Infrastruktur	17
Wilayah	
2. Peningkatan Pelayanan	18
Kesehatan dan Pendidikan Yang Berkualitas	
3. Peningkatan Peran Tokoh	20
Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenram	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	21
5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah	23
6. Peningkatan Partisipasi Publik	24
7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	25
D. Indikator Kinerja Utama	27
E. Perjanjian Kinerja	29
F. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	33
G. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2017-2022	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program	48
1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah	49
2. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Berkualitas	53
3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	58
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	61
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	66
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Bagan Struktur Organisasi	8
	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	
Gambar 1	Hubungan Antara Elemen Visi	11
Tabel 1	Indikator Kinerja Utama	29
Tabel 2	Perjanjian Kinerja	33
Gambar 2	Tema Pembangunan Tahunan RKPD 2017-2022	35
Tabel 3	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022	37
Tabel 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022	41
Tabel 5	Capaian Kinerja Pemerataan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Selatan	50
Tabel 6	Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan	53
Tabel 7	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan	56
Tabel 8	Capaian Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	59
Tabel 9	Pencapaian Peningkatan Partisipasi Publik dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	63
Tabel 10	Realisasi Anggaran Tahun 2022	68
Gambar 4	Progres Realisasi Anggaran Tahun 2022	68
Tabel 11	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	69
Tabel 12	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesesuaian Program Utama Prioritas dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024	
Tabel 13	Hasil Evaluasi atas AKIP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2021	70



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.



Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek Politik

Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa (86 desa) sebagai pelaksanaan daripada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Manajemen Pemerintah

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah) dan manajemen pelayanan publik.

3. Kewenangan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

4. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud



masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka Bupati Barito Selatan dibantu oleh :

1. Wakil Bupati,
2. Sekretaris Daerah ;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
5. Asisten Administrasi Umum;
6. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
7. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan ESDM;
8. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
9. Sekretariat Daerah yang terdiri 9 (sembilan) bagian :



- 9.1. Bagian Pemerintahan;
- 9.2. Bagian Hukum;
- 9.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 9.4. Bagian Perekonomian dan SDA;
- 9.5. Bagian Administrasi Pembangunan;
- 9.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 9.7. Bagian Organisasi;
- 9.8. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 9.9. Bagian Umum;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas bagian :
 - a. Sekretaris;
 - b. Tenaga Ahli / Tim Ahli;
 - c. Bagian Umum;
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan;
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
11. Dinas terdiri dari :
 - 11.1 Sekretariat Daerah;
 - 11.2 Sekretariat DPRD;
 - 11.3 Inspektorat Daerah;
 - 11.4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 11.5 Dinas Kesehatan;
 - 11.6 Dinas Pendidikan;

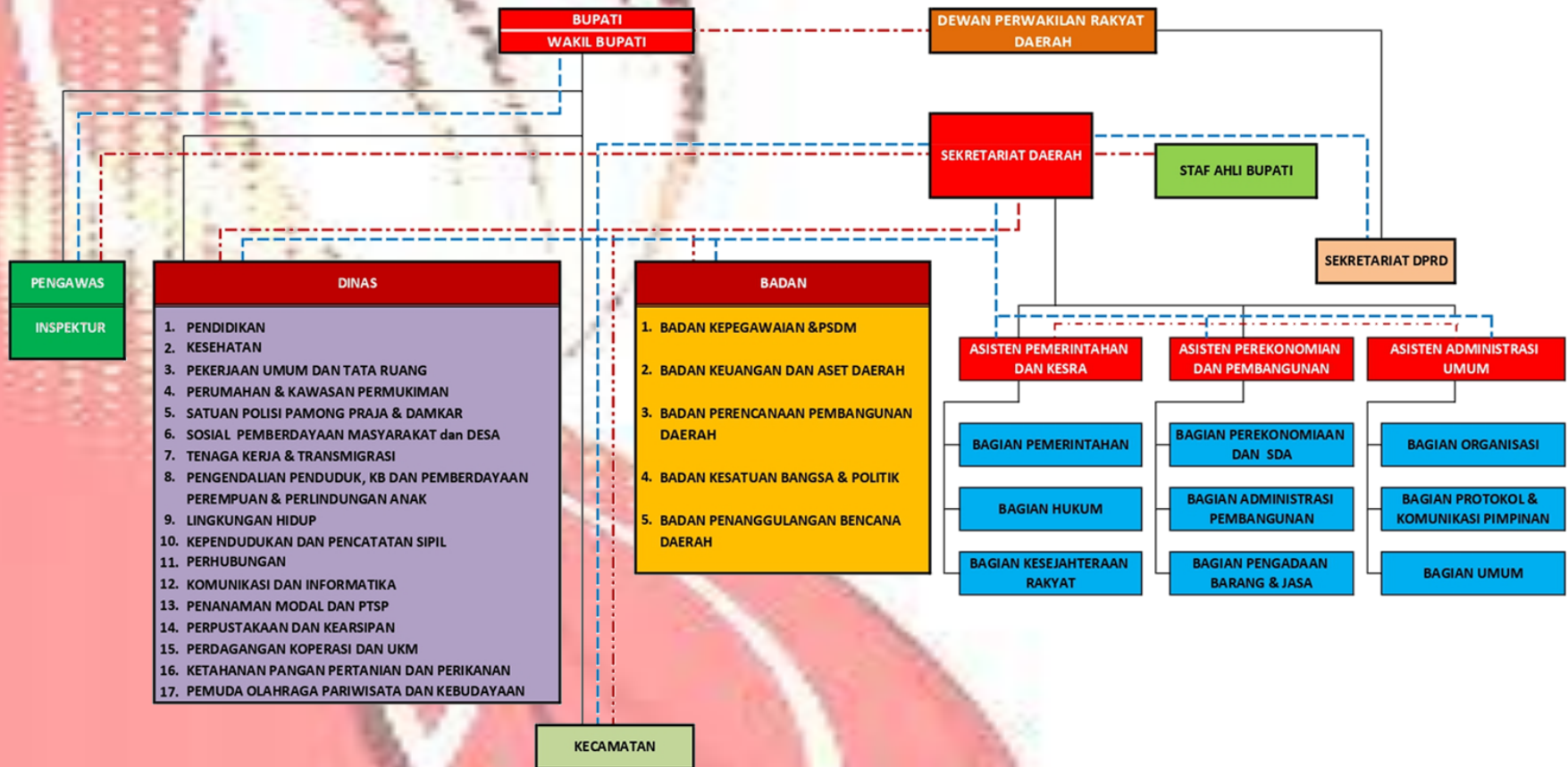


- 11.7 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11.8 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 11.9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 11.10 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - 11.11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 11.12 Dinas Perhubungan;
 - 11.13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 11.14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - 11.15 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - 11.16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 11.17 Dinas Lingkungan Hidup;
 - 11.18 Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 11.19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 11.20 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Badan terdiri dari :
- 12.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 12.2 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



- 12.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 12.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 12.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Kecamatan ada 6 (enam) terdiri atas :
 - 13.1 Kecamatan Jenamas;
 - 13.2 Kecamatan Dusun Hilir;
 - 13.3. Kecamatan Karau Kuala;
 - 13.4 Kecamatan Dusun Selatan;
 - 13.5 Kecamatan Dusun Utara;
 - 13.6 Kecamatan Gunung Bintang Awai
14. Kelurahan ada 7 (tujuh) terdiri atas :
 - 14.1 Kelurahan Rantau Kujang;
 - 14.2 Kelurahan Mangkatip;
 - 14.3 Kelurahan Bangkuang;
 - 14.4 Kelurahan Buntok Kota;
 - 14.5 Kelurahan Hilir Sper;
 - 14.6 Kelurahan Jelapat;
 - 14.7 Kelurahan Pendang
15. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)



CATATAN :

GARIS KOMANDO

GARIS PERTANGGUNGJAWABAN

GARIS KOORDINASI

—————



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik, maka Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) harus sudah ditetapkan. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Barito Selatan pada tanggal 22 Mei 2017, maka berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat sudah ditetapkan pada akhir bulan Nopember 2017 dengan perodesasi RPJMD Tahun 2017-2022.

Pada bulan Mei 2022 masa jabatan Bupati Barito Selatan dan Wakil Bupati Barito Selatan sudah berakhir dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka sesuai peraturan perundang-undangan Bupati Barito Selatan sejak bulan Mei 2022 dijabat oleh Penjabat Bupati sampai ada Bupati Barito Selatan yang definitif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 pada dasarnya adalah merupakan himpunan dari seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebaiknya harus disusun secara simultan atau bersamaan waktunya oleh segenap komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *Dahani Dahanai Tuntung Tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, merupakan manifestasi dari visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang



ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dengan menyusun RPJMD yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Barito Selatan lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang.

B. Visi Dan Misi

Visi adalah keadaan yang diharapkan terwujud dalam masa lima tahun atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

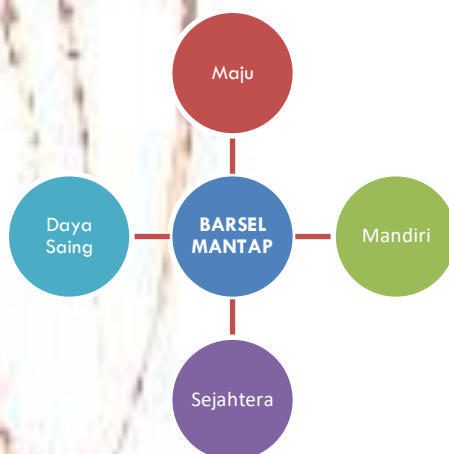
“Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa”

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu:

- 1) **Maju;**
- 2) **Mandiri;**
- 3) **Sejahtera, dan**
- 4) **Daya Saing**

yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)**, sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1
Hubungan antar-elemen Visi



Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)

Adapun yang dimaksud dengan Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang MAJU DAN MANDIRI, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang SEJAHTERA SECARA MERATA adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.



6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

Adapun yang dimaksud dengan **Kabupaten Barito Selatan yang memiliki DAYA SAING dilandasi IMAN DAN TAQWA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.

Dari pernyataan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkeinginan untuk menjadi pendorong utama dalam mewujudkan masyarakat yang *dahani dahanai tuntung tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq (taqwa).

Visi Kabupaten Barito Selatan tersebut diwujudkan dalam keinginan tekad dan komitmen bersama yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Barito Selatan, yaitu sebagai berikut :



1. *Membangunan dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan serta pengangguran* adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik desa dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa yang jauh dari jaringan listrik dan; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah; penyelesaian dan penuntasan pembangunan ruas jalan provinsi, kabupaten, jembatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20%; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha



produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas peringkat 5 se Kalimantan Tengah.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam; meningkatkan ekspor non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi



seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat, yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.



Berdasarkan visi dan misi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan
4. Meningkatkan kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan daerah Barito Selatan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik

C. Program Utama Prioritas Pembangunan Daerah

Pencapaian sasaran pembangunan RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang.

Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penjelasan ketujuh prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang menjadi **program utama** yang akan menjadi rujukan / acuan bagi seluruh Perangkat Daerah



Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun program kerja dimasing-masing Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah Pemerataan Infrastruktur Daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.
3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.
5. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.



Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan di Barito Selatan.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas

Strategi kedua adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi.
3. Menurunnya angka kematian ibu.
4. Menurunnya angka gizi buruk.
5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
6. Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.



Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur desa, akan dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan



diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang Aman dan Tenram

Strategi yang ketiga yaitu peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu Meningkatkan pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat upaya untuk menciptakan kondisi pengamalan agama yang baik adalah kerukunan antarumat beragama di antaranya



agar terjadinya dialog atau diskusi antarumat beragama, pertemuan para alim ulama atau tokoh masing-masing agama, memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengosik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut; dan meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terus akan dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati ; (4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan keempat adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Produksi hasil pertanian.
2. Meningkatnya produksi perikanan budidaya.
3. Meningkatnya produksi perikanan tangkap.
4. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.



5. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
6. Menurunnya angka kemiskinan.
7. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
8. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
9. Meningkatnya daya beli masyarakat.
10. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi local.
11. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll).
12. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
13. Terpasarnya pariwisata daerah.
14. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.
15. Meningkatnya sektor ekonomi hijau.

Strategi pembangunan ini dilaksanakan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh



masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah

Strategi pembangunan kelima adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

Strategi ini menekankan bahwa dalam pembangunan harus dilandasi dengan pendekatan pendayagunaan sumberdaya alam dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat



secara berkelanjutan. Pola konsumsi sumberdaya alam seharusnya memberi kesempatan dan peran-serta masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari .

Penggalian dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu inti dari prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa-masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedepankan pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global yang harus diperhatikan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat unggulan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Peningkatan Partisipasi Publik

Strategi pembangunan keenam adalah peningkatan partisipasi publik. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll).
3. Meningkatnya peran pemuda.
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.



Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka, (2) jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan (dan haknya), untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, maka pembangunan diperkirakan berlangsung lebih efektif dan efisien.

7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Strategi pembangunan ketujuh adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi,. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:



1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
5. Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal



pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam hal penetapan Indikator Kinerja Utama yang berpedoman pada :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur adalah diambil



dari indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dengan dukungan dari sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.

Tabel 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	- Persentase desa yang terhubung dengan pusat ekonomi	%
		- Luas area sawah terairi irigasi yang berfungsi baik	ha
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	- Persentase Penduduk berakses air minum	%
		- Persentase rumah layak huni	%
		- Presentase elektrisasi	%
		- Presentase Desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi	%
3.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	- Indeks Pembangunan Manusia	%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Indeks Pemberdayaan Gender	%
		- Level Kabupaten Layak Anak	Pratama
5.	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Bagi Masyarakat	- Angka melek huruf	%
		- Indek Pendidikan	%
6..	Meningkatnya peran pemuda	Indek Pemuda Yang Berprestasi	%



7.	Meningkatnya daya saing Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%
8.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	%
9.	Meningkatkan Iklim investasi	Persentase Laju Pertumbuhan Investasi	%
10.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	%
11.	Meningkatnya daya saing sektorK-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Laju pertumbuhan volume usaha KUKM	%
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	%
13.	MeningkatnyaTata kelola pemerintahan yang baik	- Opini BPK	Predikat
		- Indeks RB	%
		- Indeks SAKIP	Predikat
		- Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan	Predikat

E. Perjanjian Kinerja

Merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kerjanya.

Merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.



Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Rencana Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 merupakan periode terakhir atau periode kelima RPJMD Tahun 2017-2022. Perjanjian kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.



Rencana kinerja ini pula merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun 2022, karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi.

Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2022, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2022. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan kebijakan pembangunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut dari ***Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*** Maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	- Persentase desa yang terhubung dengan pusat ekonomi - Luas area sawah terairi irigasi yang berfungsi baik	95% 617,35 ha
2.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	- Persentase Penduduk berakses air minum - Persentase rumah layak huni - Presentase elektrisasi - Presentase Desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi	100% 90% 100% 90%
3.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	- Indeks Pembangunan Manusia	85%
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Indeks Pemberdayaan Gender - Level Kabupaten Layak Anak	85% Pratama
5.	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Bagi Masyarakat	- Angka melek huruf - Indek Pendidikan	99,5% 100%
6..	Meningkatnya peran pemuda	Indek Pemuda Yang Berprestasi	85%
7.	Meningkatnya daya saing Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	98%
8.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	2,43%
9.	Meningkatkan Iklim investasi	Persentase Laju Pertumbuhan Investasi	36,5%
10.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	3,5%
11.	Meningkatnya daya saing sektor K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Laju pertumbuhan volume usaha KUKM	95%
12.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	85%



13.	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik	- Opini BPK	WTP
		- Indeks RB	85%
		- Indeks SAKIP	BB
		- Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan	BB

F. Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program perangkat daerah untuk mewujudkan setiap sasaran. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 2.
Tema Pembangunan Tahunan RKPD 2017 s.d. 2022



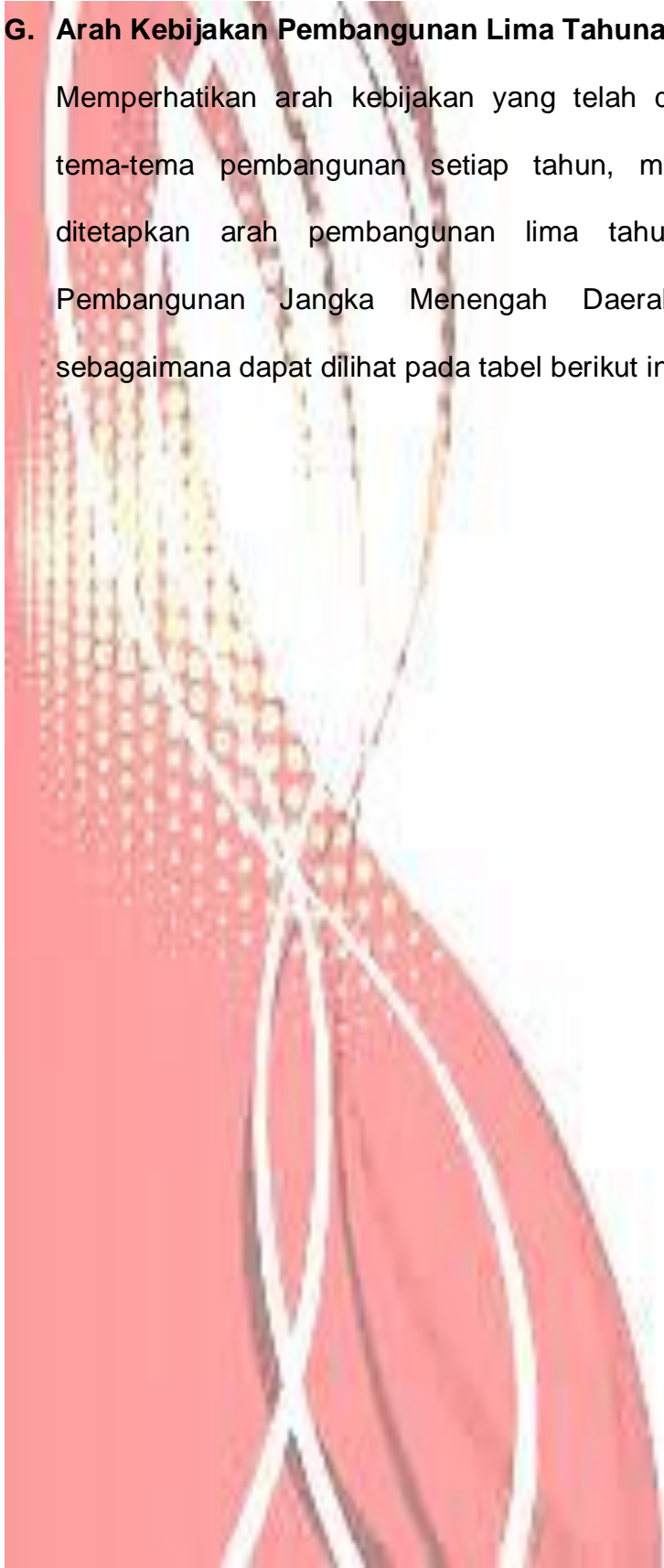
Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

- 1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2017 :
“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.
- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2018 :
“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2019 :
“Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan”.
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2020 :
“Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat”.
- 1.5 Tema Pembangunan pada Tahun 2021 :
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”.
- 1.6 Tema Pembangunan pada Tahun 2022 :
“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Baresel bermartabat”.



G. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2017-2022.

Memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tema-tema pembangunan setiap tahun, maka selanjutnya akan ditetapkan arah pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 3. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemerataan infrastruktur wilayah	1 Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	x	x				
	2 Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan	x	x	x	x	x	x
	3 Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak	x	x	x	x	x	x
	4 Peningkatan kecukupan energi	x	x	x			
	5 Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr	x	x	x			
	6 Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh	x	x	x			
	7 Peningkatan ketersediaan sumber daya air	x	x	x	x		
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas	8 Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan		x	x	x		
	9 Optimalisasi manajemen pendidikan		x	x	x		
	10 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	x	x	x			
	11 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan			x	x	x	x
	12 Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	x	x	x	x	x	x



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

		13	Peningkatan Akreditasi Sarana Kesehatan	x	x	x	x	x	x
3.	Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	14	Meningkatnya partipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	x	x				
		15	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		x	x			
		16	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	x	x	x	x		x
4.	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah	17	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis	x	x	x	x	x	x
		18	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	x	x	x	x	x	
		19	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		x	x	x		
		20	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan		x	x	x	x	
		21	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan	x	x	x	x		
		22	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	x	x	x	x	x	
		23	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	x	x	x	x	x	x
		24	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)			x	x		
		25	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal		x	x	x		
		26	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	x	x	x	x	x	x



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

5.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah	27	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	x	x	x	x		
		28	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis	x	x	x	x	x	x
		29	Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	x	x	x			
		30	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan		x	x	x		
		31	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.	x	x	x			
		32	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya	x	x	x	x		
		33	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	x	x	x			
		34	Pengembangan ekonomi unggulan yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.	x	x				
		35	Pengembangan ekonomi lokal	x	x	x	x		
6.	Peningkatan partisipasi publik	36	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	x	x				
		37	Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya	x	x	x			
		38	Meningkatnya peran pemuda	x	x	x	x	x	x



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

		39	Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana olahraga		x	x	x		
		40	Meningkatnya prestasi olah raga		x	x			
		41	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				x	x	
		42	Meningkatnya minat baca masyarakat	x	x	x			
		43	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	x	x	x	x	x	x
		44	Presentase produk kebijakan yang responsif gender		x	x	x		
		45	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	x	x	x	x	x	
7.	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	46	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	x	x	x	x	x	x
		47	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan			x	x	x	x
		48	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	x	x				
		49	Peningkatan standar pelayanan publik	x	x	x			
		50	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		x	x			
		51	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi		x	x	x		
		52	Reformasi Birokrasi	x	x	x	x	x	x



Tabel 4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa						
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
1	2	3	4	5		
Misi 1: Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.	1.1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Strategi (1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah	1.1	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi
		1.2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan		1.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan
		1.3	Meningkatnya cakupan layanan air bersih		1.3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak
		1.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.		1.4	Peningkatan ketercukupan energy
		1.5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian		1.5	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr
		1.6	Pencapaian Kawasan Kumuh		1.6	Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh
		1.7	Sanitasi Layak		1.7	Peningkatan ketersediaan sumber daya air



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

<p>Misi 2:</p> <p>Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia</p>	2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan	2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	<p>Strategi (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas</p>	2.1	Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan
			2.2	Menurunnya angka kematian bayi		2.2	Optimalisasi manajemen pendidikan
			2.3	Menurunnya angka kematian ibu		2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
			2.4	Menurunnya angka gizi buruk		2.4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)		2.5	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat
	3.	Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan	3.1	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	<p>Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram</p>	3.1	Meningkatnya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat
			3.2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat		3.2	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	4.	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah	4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	<p>Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram</p>	3.3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

<p>Misi 3:</p> <p>Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.</p>	5.	Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat	5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	<p>Strategi (4) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah</p>	4.1	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
	6.	Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat	6.1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya		4.2	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin
			6.2	Meningkatnya produksi perikanan tangkap		4.3	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
	7.	Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal	7.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi		4.4	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan
			7.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		4.5	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan
			7.3	Menurunnya angka kemiskinan		4.6	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian
			7.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja		4.7	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
			7.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		4.8	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)
			7.6	Meningkatnya daya beli masyarakat		4.9	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal
						4.10	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

8.	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM	8.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal			
		8.2	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll)			
9.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	9.1	meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
10.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	10.1	Terpasarnya pariwisata daerah			
11.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan	11.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah			
		11.2	Meningkatnya sektor ekonomi hijau			
12.	Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari	12.1	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Strategi (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah	5.1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
		12.2	Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomodatif dan konsisten		5.2	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
					5.3	Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
					5.4	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

					5.5	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.	
					5.6	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya	
					5.7	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	
					5.8	Pengembangan ekonomi unggulan yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.	
					5.9	Pengembangan ekonomi lokal	
Misi 4:	13.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	13.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Strategi (6) Peningkatan partisipasi Publik	6.1	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.			13.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)		6.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya
	14.	Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini	14.1	Meningkatnya peran pemuda		6.3	Meningkatnya peran pemuda
			14.2	Meningkatnya prestasi olah raga		6.4	Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana olahraga
						6.5	Meningkatnya prestasi olah raga



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

<p>Misi 5</p> <p>Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.</p>	15.	Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan	15.1	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	<p>Strategi (7) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi</p>	6.6	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
	6.7	Meningkatnya minat baca masyarakat					
	6.8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
	6.9	Presentase produk kebijakan yang responsif gender					
	6.10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa					
	16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	16.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		7.1	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
	16.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.2	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan			
	16.3	Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	7.3	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan			
	16.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	7.4	Peningkatan standar pelayanan public			
	16.5	Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah	7.5	Peningkatan tata kelola penyelenggara an pemerintahan			
16.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	7.6	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi				
				7.7	Reformasi Birokrasi		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan menyusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas utama program-program beserta indikator kinerja program untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan Program Utama / Prioritas Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu sebagai berikut:

1. **Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
2. **Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas;**
3. **Revitalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenteram;**
4. **Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah;**
5. **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah**
6. **Peningkatan Partisipasi Publik;**
7. **Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.**



Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022. Sehingga RKPD Tahun 2022 difokuskan pada ***“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”***.

A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan

Sebagai penyempurnaan daripada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya ***Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.***

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah.

Pencapaian ketujuh program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. *Pemerataan Infrastruktur Wilayah*

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi, penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

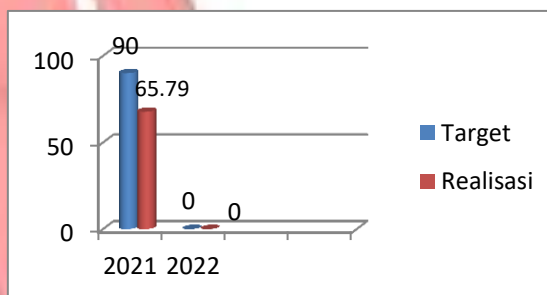
Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis antara target dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2021 s.d. tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Capaian Kinerja Pemerataan Infrastruktur Wilayah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
		Target 2021	Realisasi	Target 2022	Realisasi
Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas	Persentase desa yang terhubung dengan pusat ekonomi	90%	67,70%	95%	
	Luas area sawah terairi irigasi yang berfungsi baik	50%	28. %	11,611 Ha	2,740 Ha (23,59%)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase penduduk berakses air Minunm	67,16%	50,35%	100%	
	Persentase rumah layak huni	86,35 %	99,29 %	87,10 %	98,76 %
	Persentase elektrifikasi	Desa:100%	Desa: 94,63%	Desa:100%	Desa: 94,63%
		RT: 90%	RT:86,93%	RT: 90%	RT:87,59%
	Persentase Desa Yang Tersambung dengan Jaringan Komunikasi	86 Desa (100%)	81 desa (90%)	86 Desa (100%)	68 Desa (79%)

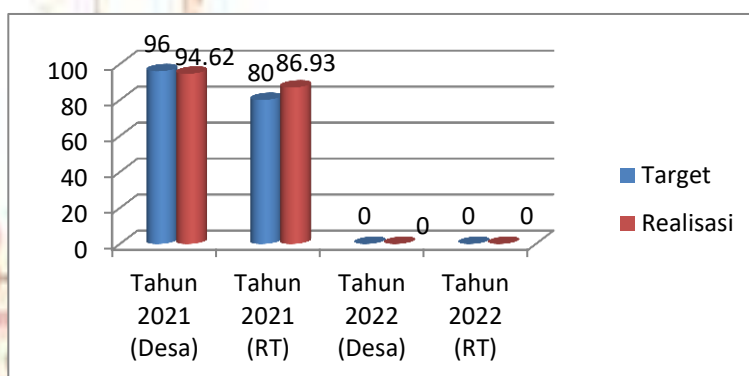
Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran dan indikator Pemerataan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan dalam matrik sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi Yang Berkualitas
 - 1.1. Persentase desa yang terhubung dengan pusat ekonomi



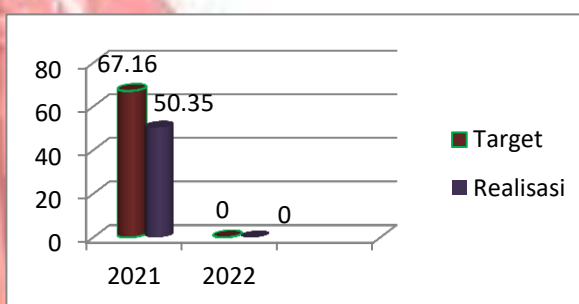
Dalam matrik dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi kinerja dalam tahun 2022 ada kenaikan dalam pencapaian target dibandingkan dengan tahun 2021 infrastruktur yang menghubungkan desa dengan pusat ekonomi.

1.2. Luas area sawah yang terairi irigasi yang berfungsi baik



2. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

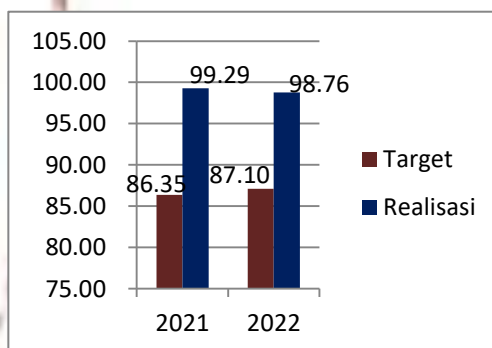
2.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum



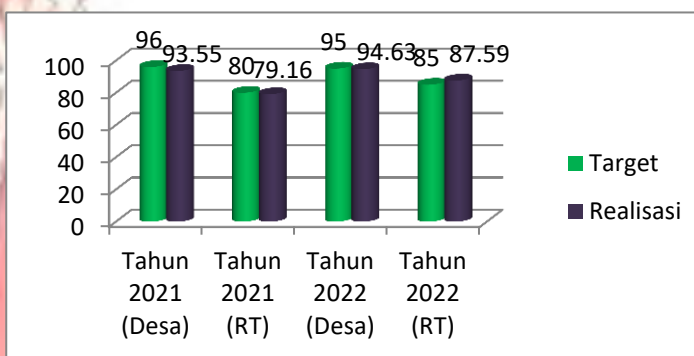
Hasil capaian dengan indikator persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2022 ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu

2.2. Persentase Rumah Layak Huni

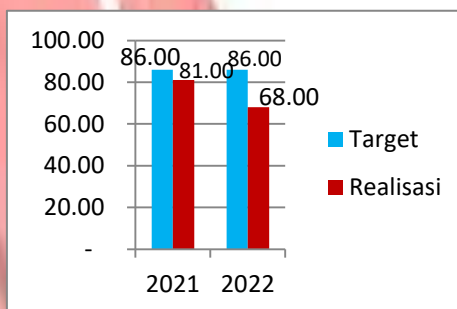
Sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat dengan indikator jumlah rumah layak huni untuk tahun 2022 capaian kinerja 98,76% karena kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni yang bersih dan sehat sudah meningkat.



2.3. Persentase Elektrisasi



2.4. Persentase Desa Yang Tersambung dengan Jaringan Komunikasi





2. Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

2.1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting apalagi di masa pandemi covid-19 sekarang ini disamping desentralisasi kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

Tabel 6.
Capaian Kinerja Bidang Pelayan Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
		Target 2021	Realisasi	Target 2022	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Manusia	100 %	70,54 %	100 %	71,01 %
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender	94,00%	92,04 %	94,10%	91,78
	Level Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Madya	Pratama
Meningkatnya Ketaatan Pengelolaan Lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	IKLH Kab=72,37%	IKLH Kab = 73,50%	IKLH Kab=73,37%	IKLH Kab = 73,72%
		IKA=60%	IKA = 52,86%	IKA=52,70%	IKA = 53,20%
		IKU=90,50%	IKU = 93,41%	IKU=90,53%	IKU = 93,38%
		ITH=73,40%	ITH = 73,16%	ITH=72,78%	ITH = 72,58%



2.1.1. Sasaran meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan indikator Indeks Pemberdayaan Manusia. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Barito Selatan dalam angka 2022 bahwa IPM Kabupaten Barito Selatan mencapai 71,01% dari target yang telah direncanakan 100%

2.1.2. Sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen. Kuatnya komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam kesetaraan gender maka dengan amanat dari Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan Tengah.



Dimana dalam menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai hak warga Negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan khususnya di Kalimantan Tengah mampu mendorong Keberhasilan IDG.

Kabupaten Barito Selatan untuk IDG tahun 2022 dengan target 94,10% tercapai 91,78%.

b. Level Kabupaten Layak Anak

Merupakan sistem berbasis hak anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan yang ditujukan menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 mendapatkan predikat pratama untuk tahun 2022 mendapatkan predikat pratama dalam kategori Level Kabupaten Layak Anak. Predikat ini menunjukkan bahwa terpenuhinya capaian indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Barito Selatan.



2.2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata.

Tabel 7.
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
		Target 2021	Realisasi	Target 2022	Realisasi
Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Bagi Masyarakat	Angka Melek Hidup	0,07	0	0,07	0
	Indeks Pendidikan	SD:100%	SD:85%	SD:98%	SD:95%
		SMP:100%	SMP:90%	SMP:90%	SMP:70%
Meningkatnya Peran Pemuda	Indeks Pemuda Yang Berprestasi	37 org	37 org	70 org	70 org

Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran dan indikator Bidang Pelayan Pendidikan dapat di jelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Sasaran meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan indikator

a. angka melek huruf

Adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan



menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Melalui layanan program pendidikan keaksaraan diharapkan masyarakat buta aksara dapat meningkat kualitas hidupnya sebagai awal langkah untuk jenjang berikutnya. Masyarakat yang buta aksara mengikuti pendidikan keaksaraan dasar, selanjutnya keaksaraan lanjutan, dan selanjutnya ke jenjang pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA,”

Dengan dilaksanakan program pendidikan keaksaraan maka dapat menurunkan jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan yang buta aksara. Untuk tahun 2022 dengan target 0,07% dengan realisasi 0%

b. Indeks Pendidikan

Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Dengan tujuan utama sasaran untuk meningkat angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP



3. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor. Melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah sehingga pengembangan strategi kemandirian ekonomi daerah dapat tercapai.

Tabel 8.
Pencapaian Peningkatan
Kemandirian Ekonomi Daerah

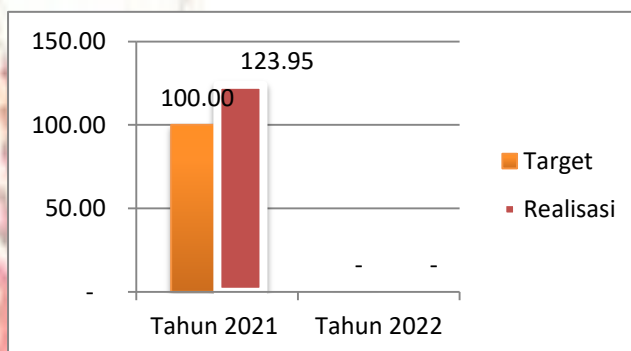
Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
		Target 2021	Realisasi	Target 2022	Realisasi
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	4.065,35 (100%)	5.004,43 (123,95)		
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	50 KK (100%)	50 KK (100%)	2,43 %	6,82%
Meningkatnya Iklim Investasi	Persentase Laju Pertumbuhan Investasi	2.290.452.000 (77,80%)	632.470.000 (55,61%)	50 M	PMDN : 183.465.800.000
					PMA : 176.068.500.000
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69,68%	64,68%	70%	63,48%



Meningkatnya peran Kelembagaan dan Permodalan K-UMKM dalam Pengembangan Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Volume Usaha K-UMKM	700 Unit	629 Unit (89,86%)	662 Unit	650 Unit
---	--------------------------------------	----------	-------------------	----------	----------

Hasil capaian kinerja sasaran dan indikator Program Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah sebagai berikut :

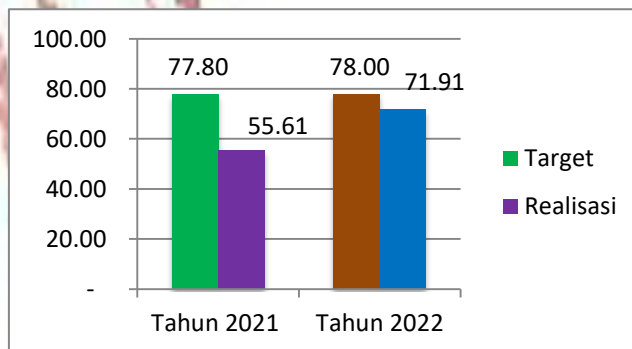
3.1. Sasaran meningkatnya daya saing sektor pertanian dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor pertanian dengan progres capaian kinerja :



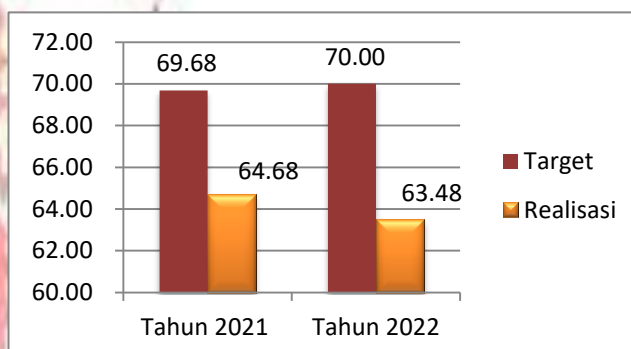
3.2. Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja angka kemiskinan :



3.3. Sasaran meningkatnya iklim investasi dengan indikator kinerja persentase laju pertumbuhan investasi :



3.4. Sasaran meningkatnya partisipasi angkatan kerja dengan indikator kinerja angka partisipasi angkatan kerja :



3.5. Sasaran meningkatnya daya saing sektor K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal dengan indikator kinerja persentase laju pertumbuhan volume usaha K-UMK :





4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.

4.1. Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.2. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggara pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan efektif pemerintah



dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi dan integrasi organisasi serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Disamping itu Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 9.
Pencapaian Peningkatan Partisipasi Publik dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja			
		Target 2021	Realisasi	Target 2022	Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Blm Keluar
	Indeks Hasil PMPRB	B	CC (51,06)	B	CC (50,65)
	Indeks SAKIP	B	CC (57,19)	B	CC (56,47)
	Indek Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD)	Tinggi	Dalam Proses Evaluasi	Tinggi	Dalam Proses Evaluasi



Hasil pencapaian kinerja sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai berikut :

1. Opini BPK

Pemeriksaan atas laporan keuangan yaitu untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK atas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun 2021 mendapat **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tahun 2022 masih dalam tahap pemeriksaan.

2. Indeks IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara



pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

3. Indeks PMPRB

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 adalah 50,65 masih dalam kategori CC. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik belum memiliki dampak yang signifikan yang ditandai dengan menurunnya nilai pada komponen hasil antara dan total komponen hasil dibandingkan dengan indeks



Reformasi Birokrasi tahun 2021 memperoleh nilai 51,06 tapi masih dalam kategori CC.

4. Indeks SAKIP

Indeks SAKIP Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 56,47 dengan predikat CC. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **Cukup**. Masih perlu banyak perhatian walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Tahun 2021 indeks SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai **57,04** atau predikat **CC**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

5. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap satu tahun anggaran atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome), terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2022.

Tahun 2022 indeks penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barito Selatan masih dalam tahap evaluasi.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran tahun 2022 terhadap program dan kegiatan prioritas dalam mendukung capaian kinerja Bupati selaku Kepala Daerah masih dalam tahap penyusunan realisasi akhir

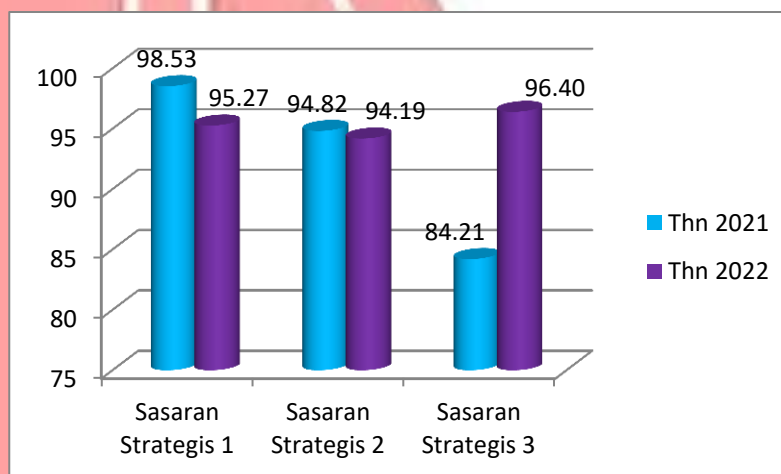
Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada program utama / prioritas dalam mendukung sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut :

Tabel 10.
Realisasi Sasaran Strategis 2022

No.	Sasaran Strategis	Tahun 2022			Tahun 2021	
		Anggaran *	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana	145,336,384,446.00	138,467,244,676.11	95.27	224.954.625.830,04	98,53
2.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah	27,896,752,031.00	26,276,250,425.00	94.19	40.331.084.907,00	94,82
3.	Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam rangka Peningkatan Partisipasi Pelayanan Publik dan Kualitas Reformasi Birokrasi	20,891,704,851.00	20,139,332,229.00	96.40	89.320.764.752,00	84,21
	JUMLAH	194,124,841,328.00	184,882,827,330.11	95.24	775.971.890.137,30	91,93

*Anggaran setelah perubahan

Gambar 4. Progres Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
Tahun 2021 dan 2022





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Tabel.11

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.084.477.113.908,13	1.132.020.979.985,67	104,38	999.177.348.834,60
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	98.065.794.810,13	80.625.253.962,42	82,22	97.888.185.041,43
Pajak Daerah	30.430.600.000,00	13.225.974.299,00	43,46	11.025.820.968,62
Retribusi Daerah	7.133.961.683,75	6.302.465.018,00	88,34	3.730.853.219,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.209.260.800,00	12.460.909.382,00	122,05	10.229.423.811,00
Lain-lain PAD yang sah	50.291.972.326,38	48.635.905.263,42	96,71	72.902.087.042,32
PENDAPATAN TRANSFER	979.064.635.151,00	1.045.252.098.794,25	106,75	878.325.610.335,17
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	934.548.853.412,00	1.000.169.797.711,00	107,02	846.957.928.922,00
Dana Perimbangan	859.326.217.412,00	927.210.037.471,00	107,90	760.632.446.042,00
Dana Insentif Daerah (DID)	3.659.236.000,00	1.829.618.000,00	50,00	0,00
Dana Desa	71.563.400.000,00	71.130.142.240,00	99,39	86.325.482.880,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.515.781.739,00	45.082.301.083,25	101,27	31.367.681.413,17
Pendapatan Bagi Hasil	44.515.781.739,00	44.932.301.083,25	100,94	31.367.681.413,17
Bantuan Keuangan	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.346.683.947,00	690.196.801.953,03	83,62	22.963.553.458,00
Pendapatan Hibah	7.346.683.947,00	6.143.627.229,00	83,62	2.058.903.458,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	20.904.650.000,00
BELANJA DAERAH	1.093.725.173.615,00	1.022.161.672.914,14	93,46	969.787.183.883,34
BELANJA OPERASI	730.791.987.518,00	690.196.801.953,03	94,45	622.778.234.344,34
Belanja Pegawai	434.675.136.621,00	390.856.704.438,00	89,92	397.118.119.476,00
Belanja Barang dan Jasa	250.659.651.453,00	252.905.297.884,00	100,90	182.839.126.379,34
Belanja Bunga	926.217.034,00	926.217.034,00	100,00	686.609.000,00
Belanja Subsidi	1.400.287.410,00	926.898.010,00	66,19	1.285.000.000,00
Belanja Hibah	39.630.695.000,00	41.117.569.088,00	103,75	37.881.873.874,00
Belanja Bantuan Sosial	3.500.000.000,00	3.464.115.500,00	98,97	2.967.505.615,00
BELANJA MODAL	193.454.956.675,00	179.379.443.149,00	92,72	179.954.701.544,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	871.300.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.771.347.489,00	29.493.655.372,00	84,82	35.300.084.296,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.390.600.136,00	61.637.542.649,11	95,72	49.822.099.670,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	94.251.469.050,00	88.206.715.128,00	93,59	93.419.368.287,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.540.000,00	41.530.000,00	99,98	541.849.291,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

BELANJA TIDAK TERDUGA	27.169.548.984,00	12.905.378.788,00	47,50	22.176.959.715,00
Belanja Tidak Terduga	27.169.548.984,00	12.905.378.788,00	47,50	22.176.959.715,00
BELANJA TRANSFER	142.308.680.438,00	139.680.049.024,00	98,15	144.877.288.280
Belanja Bagi Hasil	3.779.144.338,00	1.700.837.864,00	45,01	1.132.305.400,00
Belanja Bantuan Keuangan	138.529.536.100,00	137.979.211.160,00	99,60	143.744.982.880,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(9.248.059.706,87)	109.859.307.071,53	(1.187,92)	29.390.164.951,26
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	71.549.538.898,87	71.549.538.838,87	100,00	133.930.402.614,61
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.549.538.898,87	71.549.538.838,87	100,00	83.930.402.614,61
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	62.300.000.000,00	62.295.823.439,00	99,99	91.803.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	12.300.000.000,00	12.300.000.000,00	100,00	8.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Uang yang Jatuh Tempo	50.000.000.000,00	49.995.823.439,00	99,99	83.303.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	9.249.538.898,87	9.253.715.399,87	100,05	42.526.957.410,61
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.479.192,00	119.113.022.471,40	8.052.573,46	71.917.122.361,87





Tabel.12

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Kesesuaian Program Utama / Prioritas dalam
RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan dengan
Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024

No	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMN	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMD
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah;
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas;
3.	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi.
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revitalisasi Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat Yang Aman dan Tenang;
5.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Infrastruktur Wilayah
6.	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah
7.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Partisipasi Publik;



BAB IV PENUTUP

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan yang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat **keberhasilan dan kegagalan** pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 -2022

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada rentang tahun 2017-2022 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

Sangat disadari, disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Dalam rangka mencapai target-target indikator yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Barito Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 13.
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2022

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2017	47,06	C
2.	2018	56.90	CC
3.	2019	57,46	CC
4.	2020	59,04	CC
5.	2021	57,19	CC
6.	2022	56,47	CC



Namun hasil penilaian tersebut masih memerlukan perbaikan lebih lanjut karena tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Upaya perbaikan kedepan tetap terus dilakukan agar laporan LaKIP menyajikan informasi-informasi yang selaras dengan tujuan/sasaran yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja pada RPJMD. Tindak lanjut Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/175/2020 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Selatan. Maka Tim Peningkatan SAKIP Kabupaten Barito Selatan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya perbaikan penerapan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan fokus pada hal-hal yang strategis.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dalam hal kegiatan evaluasi AKIP untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.



c. Perbaiki-perbaiki terhadap beberapa sasaran yang tidak berhasil mencapai target yang sudah ditentukan dalam sasaran indikator kinerja dalam RPJMD.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahana Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***